

STRATEGI PENGENTASAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN MOJOKERTO

Ida Alifiatin

12040254061 (Prodi S-1 PPKn, FISH, UNESA) alifiatinida@gmail.com

Oksiana Jatiningsih

0001106703 (PPKn, FISH, UNESA) oksianajatiningsih@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam pengentasan anak jalanan (2) mengungkap hambatan yang dihadapi dalam strategi pengentasan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Informan penelitian berjumlah enam orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan triangulasi sumber dan teknik. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori pendidikan kritis yang dikemukakan oleh Paulo Freire yang menjelaskan mengenai pendidikan gaya bank (*banking education*) dan pendidikan hadap-masalah (*problem possing education*). Hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan dalam pengentasan anak jalanan meliputi sosialisasi, razia, pembinaan dan pengiriman anak ke UPT Jawa Timur kurang efektif karena tidak mendasarkan pada *problem possing education* sehingga dalam program pengentasan yang dilakukan belum bisa menumbuhkan kesadaran kritis anak jalanan karena lebih mendasarkan pada *banking education*. Dan hambatan yang dialami dalam proses pengentasan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat yang masih memberikan uang kepada anak jalanan, kurangnya antusiasme anak jalanan, dan kurangnya dukungan dari keluarga anak jalanan yang tidak memperbolehkan anaknya untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan.

Kata Kunci:

Strategi, kesadaran kritis, pengentasan anak jalanan.

Abstract

The purpose of this study were (1) to describe strategy done by social department of Mojokerto regency for reducing street children in mojokerto district (2) to uncover obstacles experienced reduction in the street children in Mojokerto regency. This study used a qualitative approach that produces descriptive data in the form of written words. The Research infroman totaled six people. Data collection techniques use depth interviews, observation, and documentation. Then, the technical validity of the data using triangulation techniques and resources. The theory used as a knife analysis is critical education theory of Paulo Freire explaining about banking education and problem possing education. The results of this study indicate that the strategy by social department of Mojokerto for handle problem's street children in Mojokerto are socialization, raid, choaching and bring street children to UPT Jawa Timur. The strategies not based on problems possing education, so the programs that do by social department can't raise critical awareness of street children and can't alleviate the problem of street children because the strategy based on banking education. And obstacles experienced in the process reduction street children in Mojokerto regency are the lack of support from society that still give money to street children, the lack of enthusiasm of street children, and lack of support from the families of street children who do not allow their children to attend coaching and training.

Keywords: Strategy, critical awareness, reduction of street children.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu krusial yang bukan lagi kejadian sementara (*transient event*), melainkan menjadi fenomena kronis yang terjadi antar-generasi. Kemiskinan dengan sederet kompleksitas masalah yang lain tidak bisa dihindari oleh negara manapun sehingga tidak ada satupun negara yang kebal dari problem tersebut, baik di kota maupun di desa. Seperti halnya di Mojokerto, sebagai daerah yang memiliki banyak tempat wisata budaya

peninggalan kerajaan terbesar se-Asia Tenggara yang juga tidak kebal dengan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan negara.

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi, tidak bisa dipahami karena satu faktor saja. Kemiskinan yang dialami oleh individu atau kelompok bukan karena faktor etos kerja yang kurang, namun harus melihat faktor eksternal seperti model pembangunan yang dianut negara, Pada dasarnya orang miskin mempunyai etos kerja yang

tinggi karena mereka tidak mempunyai waktu untuk bermalas-malasan, mereka bekerja lebih keras dari orang kaya jika tidak kerja keras maka tidak mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi penyebab kemiskinan tidak dapat dipandang karena satu faktor saja melainkan banyak faktor yang melatarbelakanginya.

Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinanpun sangat bermacam-macam. Tidak hanya masalah kelaparan, ekonomi, pendidikan, bahkan juga psikologis. Krisis ekonomi membuat keluarga kurang mampu mencukupi kebutuhan fisiologisnya. Menurut Maslow kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, seperti makanan, minuman, tempat berteduh, dan tidur. Kebutuhan ini yang paling dasar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan akan mengabaikan atau menekan segala kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpenuhi. Sehingga krisis ekonomi mampu memicu munculnya masalah-masalah sosial yang lain seperti maraknya anak jalanan.

Hidup sebagai anak jalanan bukan pilihan, namun situasi memaksa mereka menjadi anak jalanan. Banyak faktor yang mendorong anak terjun ke jalanan, menurut Suyanto dan Hariadi (1999:22) salah satu faktor pendorong seorang anak menjadi anak jalanan adalah faktor ekonomi keluarga, sangat kurangnya pemenuhan kebutuhan oleh keluarga dapat mendorong anak untuk terjun ke jalanan. Selain itu, faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu memenuhi kebutuhan juga dapat mengakibatkan masalah eksloitasi anak, ia dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan di jalanan sehingga anak sering menjadi korban sindikat dan eksloitasi.

Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum. Mereka anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih-sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat (Suyanto dan Hariadi 1999:41). Mereka berada nasib di jalanan dengan alasan yang berbeda-beda mulai dari kemiskinan, korban eksloitasi, penelantaran anak, bahkan anak dari keluarga yang mampu juga bisa menjadi anak jalanan karena faktor kondisi keluarga (*broken home*) yang tidak bisa menciptakan kenyamanan bagi mereka.

Pada dasarnya, menjadi anak jalanan menanggung resiko yang besar bagi dirinya. Mulai dari melakukan jenis pekerjaan dengan taruhan nyawa mereka, namun mengemis di jalan raya yang tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan dan hanya akan merugikan mereka karena dengan resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang dari segi kesehatan maupun sosial sangat tidak humanis. Keselamatanpun dipertaruhkan untuk mencari uang di jalanan, karena tidak jarang dari mereka yang menjadi obyek perlakuan sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Anak jalanan tergolong anak yang tidak berdaya dan tidak memperoleh kesejahteraan sosial.

Ketidakberdayaan anak jalanan dalam menghadapi berbagai macam masalah dan tekanan baik karena faktor internal dari dalam dirinya maupun faktor eksternal dari keluarga dan lingkungannya membuat pendidikan, cita-cita, dan masa depan mereka hilang. Padahal setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua anak jalanan seharusnya menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab atas masa depan anak, namun keterbatasan dan ketidaktahuan mereka membuat hak-hak anak tidak dapat terpenuhi.

Ada faktor pendorong dan penarik anak untuk hidup di jalanan yaitu faktor ekonomi dan faktor keluarga. Faktor ekonomi meliputi kesulitan ekonomi keluarga sehingga mendorong anak untuk mencari uang di jalanan, karena jalanan menyediakan fasilitas yang bisa menghasilkan uang walau tanpa modal dan keahlian. Faktor yang lain adalah faktor keluarga meliputi konflik keluarga dan orang tua bagian dari komunitas jalanan, jika dalam keluarga tidak dapat memberikan kenyamanan atau rasa tidak cocok maka anak tidak akan betah di rumah, dan pergi ke jalanan yang memberikan fasilitas kebebasan dan penghasilan yang membuat anak mampu bertahan hidup tanpa tergantung pada orang tua.

Anak jalanan juga dikategorikan dalam kelompok yang berbeda-beda dilihat dari hubungan dengan keluarga, motif dan sebab mereka terjun ke jalanan untuk mencari nafkah, seperti yang dikemukakan oleh Suyanto dan Hariadi (2002:15-16).

Anak jalanan dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu: Pertama, *children on the street* yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak dijalanan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban

atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *children of the street* yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab (kekerasan) sehingga lari atau pergi dari rumah.

Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi bahkan sejak dalam kandungan.

Permasalahan tentang anak jalanan adalah masalah yang kompleks, sebab masalah ini tidak mutlak pada masalah anak yang bekerja di jalanan untuk mencari uang. Namun anak jalanan akan dihadapkan pada situasi yang sulit ketika mereka mengalami kekerasan, eksloitasi, serta bahaya lalu lintas yang tentu mengancam keselamatan nyawa. Mojokerto salah satu kota besar di Jawa Timur yang didiami oleh 1.186.497 jiwa pada tahun 2015 yang didalamnya juga terdapat puluhan bahkan ratusan anak jalanan yang berdua nasib untuk mencari nafkah untuk bertahan hidup.

Tabel 1 Anak jalanan di Mojokerto tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah anak jalanan
2012	106
2013	123
2014	128
2015	104

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Tahun 2015

Permasalahan anak jalanan di Indonesia khususnya di Jawa Timur bukan hanya terletak pada kurangnya kesempatan anak-anak itu untuk memperoleh pendidikan, melainkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang kurang simpati dengan kehidupan pekerja anak yang melakukan aktivitas ekonomi di jalanan, sehingga terjadi eksloitasi yang dapat menganggu perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Fakta di lapangan tidak jarang orang tua secara terang-terangan menggunakan anak untuk membantu pemenuhan kebutuhan. Anak dibawah umur dijadikan alat untuk mencari uang dijalanan, dengan usianya yang masih tergolong anak-anak tentu tidak memiliki keahlian khusus untuk bekerja secara normal sehingga mereka terjun ke jalanan untuk mengemis, mengamen, mengelap kaca

mobil, membagikan selembar amplop, yang sekiranya tidak memerlukan keahlian khusus agar mendapat rupiah dan jalanan menyediakan semua itu.

Masalah anak jalanan adalah kondisi yang perlu diperbaiki, dengan demikian sangat diperlukan penanganan masalah atau suatu upaya untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan. Upaya yang dilakukan memang tidak dapat menghilangkan sepenuhnya problematika anak jalanan, namun dapat meminimalisir serta menghambat laju peningkatan jumlah anak jalanan setiap tahunnya, sehingga dapat membatasi eskalasi meluasnya lingkup masalah anak jalanan, jika anak jalanan semakin bertambah maka kemungkinan masalah eksloitasi, pemerasan dan masalah yang lain akan bertambah karena mereka sangat rentan dijadikan objek kekerasan di jalanan.

Ada kesulitan psikologis dan sosial yang cukup besar untuk mengembalikan anak-anak yang sudah menjadi anak jalanan ke dalam kehidupan semestinya. Upaya penyelesaian masalah anak jalanan memerlukan kegiatan bimbingan psiko-sosial yang sistematis dan berkesinambungan artinya tidak hanya sekali dalam penanganan di lapangan, namun perlu dukungan penuh dari keluarga selain dari institusi sosial untuk mengarahkan anak agar mempunyai pemikiran yang realistik tentang masa depan mereka dan sadar tentang bahaya hidup di jalanan karena jalanan bukan tempat yang aman bagi mereka. Tetapi jalanan menghadapkan mereka pada masalah-masalah yang harus dihadapi.

Resiko menjadi anak jalanan sangat membahayakan, banyak masalah yang harus dihadapi anak yang hidup jalanan. Kehidupan yang mereka hadapi tidak seperti kehidupan normatif yang ada di masyarakat, bekerja 8 jam sampai 11 jam per hari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang beresiko terancam nyawa karena tidak jarang dari mereka naik-turun angkutan umum untuk mengamen dan mengemis di jalan raya. Adapun delapan masalah utama yang harus dihadapi anak jalanan yaitu masalah pendidikan, intimidasi, penyalahgunaan obat dan zat adiktif, kesehatan tubuh, tempat tinggal, resiko kerja, hubungan dengan keluarga, serta makanan.

Mojokerto sebagai daerah bekas kerajaan Mojopahit yang terbesar se-Asia Tenggara memiliki banyak peninggalan bersejarah kerajaan yang masih dilestarikan. Banyak wisata budaya dan wisata alam pegunungan yang telah banyak dikunjungi oleh pengunjung domestik ataupun luarnegeri. Hal itu dimanfaatkan oleh anak jalanan untuk ladang mencari nafkah, dengan beroperasi di tempat keramaian sebagai pengemis, pengamen, pedagang koran, pedagang rokok dan pembersih kaca mobil. Selain itu, mereka juga sering beroperasi di perempatan jalan (*traffic light*), dengan sasarannya adalah pengemudi dan

penumpang kendaraan roda empat, dengan hal itu mereka bisa mencukupi kebutuhan fisiologisnya dan bertahan hidup.

Anak jalanan tetaplah anak-anak bangsa yang menjadi aset pada masa depan sehingga wajib dilindungi oleh negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 UUD NRI 1945, dengan demikian sudah jelas bahwa perlindungan terhadap warga negara harus dilakukan tanpa terkecuali, termasuk juga perlindungan anak jalanan. Dalam upaya mewujudkan hak anak, Indonesia telah menjadi salah-satu negara yang meratifikasi *"The World Convention On The Rights of The Child 1989* (Konvensi Hak Anak/KHA)", konvensi ini merupakan konvensi perjanjian internasional yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang membahas mengenai hak-hak anak, selanjutnya diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah diperbarui dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) PBB Tahun 1990 menyebutkan hak anak meliputi hak sipil dan kemerdekaan (*civil right freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), hak kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), hak memperoleh pendidikan dan budaya (*education, leisure and culture activities*), dan hak adanya perlindungan khusus (*special protection*).

Pada UUD NRI tahun 1945 pasal 34 ayat (1) dan UU No. 35 tahun 2014 dengan jelas menyebutkan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap anak jalanan untuk dibina sebagaimana mestinya, untuk mensejahterakan kehidupan bermasyarakat guna memenuhi hakikat pembangunan Indonesia. Hakikat pembangunan itu sendiri adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya sehingga mampu mensejahterakan rakyat, meningkatkan pendapat, kesempatan peluang berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan yang dalam hal ini harus diberikan kepada anak jalanan.

Masalah anak jalanan wajib untuk ditangani dengan cara disadarkan dan diberdayakan, hal itu termuat dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib untuk memberdayakan, memelihara dan mengentas anak jalanan agar dapat hidup normal layaknya anak pada umumnya, hal tersebut telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 pasal 55 ayat 1-5. Pemerintah Daerah bukan sebagai aktor tunggal dalam penanganan kasus anak jalanan, namun Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial mempunyai andil besar dalam penanganan permasalahan ini dan disamping itu adapun peran

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Rumah Singgah yang kerap kali menjadi pendamping Pemerintah Daerah dalam menangani kasus anak-anak jalanan.

Pemerintah Daerah juga perlu menyadarkan anak tentang bahaya kehidupan di jalanan, adanya hak-hak yang harus diperjuangkan sehingga mereka benar-benar berdaya, mandiri dan tidak bergantung pada bantuan yang diberikan. Jika mereka telah berdaya dan sadar akan hak yang dimiliki maka kemungkinan besar mereka akan memilih hidup yang lebih layak dan meninggalkan jalanan. Uraian diatas seperti yang dikemukakan oleh Pauolo Freire (dalam Nuryatno, 2008:8) bahwa manusia adalah penguasa atas dirinya dan memiliki fitrah menjadi manusia yang merdeka dan bebas, anak jalanan sebagai kaum tertindas harus bisa membebaskan diri mereka sendiri dari penindasan pada kehidupannya. Dikatakan sebagai anak yang tertindas karena mereka melakukan pekerjaan yang tidak manusiawi, hak-hak asasnya dinistakan, dan mereka tidak berdaya. Sehingga jika mereka diberdayakan dengan meningkatkan kesadaran kritisnya maka mereka akan mampu mengentaskan dirinya dari jalanan.

Teori pendidikan kritis yang pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan rakyat tertindas salah satunya dikemukakan oleh Paulo Freire dengan pemikiran dasarnya tentang *banking education* (pendidikan gaya bank) dan *problem possing education* (pendidikan hadap masalah). Pemikiran pendidikan hadap masalah menentang tentang pendidikan gaya bank karena dalam pemikirannya manusia dianggap sebagai makhluk yang tidak pasif dan hanya menerima apa yang diberikan oleh penguasa. Sedangkan pendidikan hadap masalah menganggap manusia sebagai makhluk yang sadar dan mempunyai potensi, kesadaran tersebut terbagi menjadi kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis. Kesadaran kritis membuat manusia dapat berfikir kritis untuk memecahkan masalah hidup yang dialami. Masalah-masalah manusia yang berhubungan dengan dunia, dihadapkan untuk dipecahkan. Manusia yang sadar akan kedudukannya dapat menemukan bahwa kenyataan muncul sebagai suatu permasalahan yang harus diatasi. Tujuan utama teori pendidikan hadap masalah yaitu menciptakan sebuah kesadaran kritis (*Conscientizacao*) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah konsientisasi, proses kontiensi sejalan dengan terciptanya pengembangan *mindset* anak jalanan sehingga mereka akan menjadi tuan dari pemikirannya sendiri mampu mengenali kelebihan dan kekurangan dari dirinya sendiri (Hidayat, 2013:20).

Konsep konsientisasi identik dengan upaya pembebasan manusia menjadi berdaya, pemberdayaan terhadap berbagai kelompok marginal, petani, dan anak

jalanan agar mereka mampu mencapai kesadaran kritis untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik tanpa bertumpu tangan pada takdir. Jika diaplikasikan dengan masalah anak jalanan, maka *PPE* mengharapkan adanya proses penyadaran anak jalanan untuk bisa lebih menghargai hidup dan masa depannya, mereka harus mempunyai kesadaran kritis dalam menghadapi masalah yang ada dalam hidupnya. Penyadaran adalah kunci untuk memberdayakan kaum tertindas seperti anak jalanan, jika mereka sadar bahwa menjadi anak jalanan akan merugikan dirinya dan keluarganya karena taraf hidupnya akan tetap dan tidak dapat meningkatkan derajat serta martabat keluarga maka mereka perlukan sadar dan mencoba menggali potensi untuk pekerjaan yang layak dan meninggalkan jalanan.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada masalah anak jalanan yang marak terjadi di daerah Mojokerto. Masalah tersebut tergolong dalam problem kewarganegaraan yang harus bisa diatasi oleh pemerintah sehingga diperlukan strategi pengentasan anak jalanan yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kritis anak jalanan untuk dapat menyadarkan mereka, meski penanganan yang dilakukan seringkali belum mampu menghilangkan akar masalah yang sesungguhnya yaitu kemiskinan, namun strategi pengentasan dilakukan untuk meminimalisir bertambahnya jumlah anak jalanan tiap tahun dan peningkatan masalah kompleks yang berkaitan dengan anak jalanan. Banyak anak jalanan yang setelah diberikan penanganan masih kembali lagi ke jalanan hal ini tentu berkaitan dengan strategi yang dilakukan. Oleh karena itu dalam penelitian akan dijelaskan mengenai strategi pengentasan yang diterapkan dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto.

METODE

Penelitian dengan judul “Strategi Pengentasan Anak Jalanan di Kabupaten Mojokerto” menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif juga penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mojokerto dalam mengentas anak jalanan. Penelitian ini dilakukan

pengamatan secara seksama terkait dengan strategi pengentasan anak jalanan yang secara hukum harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dan dalam masalah anak jalanan dinaungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan Lembaga Swasta lainnya, melalui observasi serta wawancara mendalam sehingga diperoleh data terkait strategi pengentasan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto.

Waktu penelitian merupakan waktu yang dibutuhkan dalam tahap pengajuan judul, penyusunan proposal sampai dengan penyusunan laporan skripsi. Subjek penelitian adalah adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu obyek dan penelitian. Subjek penelitian ini adalah pihak yang menangani masalah anak jalanan sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, ketua bidang rehabilitasi sosial dan seksi pemulihan di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam menjawab permasalahan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang digunakan maka peneliti tidak akan mendapatkan dan yang diinginkan serta memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini ditekankan pada tiga hal yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumen (dokumentasi). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini mengungkap tentang strategi pengentasan anak jalanan di Kab. Mojokerto dengan uraian narasi yang akan menunjukkan permasalahan yang bahas. Miles dan Huberman (1992:20) mengemukakan bahwa aktvitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Penelitian tentang strategi pengentasan anak jalanan di Kab. Mojokerto ini menggunakan analisis data yang dilakukan secara interaktif. Analisis data model interaktif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berdasarkan struktur organisasinya terdiri dari tiga bidang yaitu bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, serta bidang pemberdayaan sosial. Setiap bidang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah wanita harapan, gepeng, dan anak jalanan. Anak jalanan harus mendapatkan perhatian khusus karena pada umumnya mereka sama dengan anak-anak lainnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga harus ada sebuah

strategi pengentasan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto untuk memulihkan hak dan martabat anak jalanan.

Mengeluarkan Anak dari Lingkungan Jalanan

Salah satu strategi untuk mengentaskan anak jalanan agar tidak tinggal, mengemis, mengamen di jalanan yaitu dengan mengeluarkan mereka dari jalanan. Tim razia gabungan ini terdiri dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang dibantu oleh pihak bagian hukum Setda Kab. Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja, Denpom, pihak Kejaksaan Mojokerto, pihak Pengadilan Negeri Mojokerto dan pihak Kepolisian Resor Mojokerto. Tim razia gabungan ini dinaungi langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto dan diketuai oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Tujuan dari razia tersebut guna mengeluarkan PMKS dari jalanan untuk dilakukan rehabilitasi sosial yang bertujuan memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial mereka agar tidak ada kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat. Tugas dari tim razia gabungan meliputi perencanaan kegiatan razia, pelaksanaan koordinasi ketika razia, melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dalam Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 118.45/131/KEP/416-000/2016 tentang pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan operasi razia. Kegiatan ini sangat diperlukan guna mengentaskan anak jalanan dari lingkungan jalanan seperti yang disampaikan oleh kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial Bapak Liyanto,

“Anjal harus bisa diajukan dari lingkungan jalanan agar mereka tidak kembali lagi mengemis di jalanan karena usia muda mereka seharusnya usia produktif untuk bersekolah sehingga kelak bisa bekerja dengan semestinya, tidak malah mengemis. Ada upaya penanganan pertama untuk mengeluarkan mereka dari jalanan yaitu oleh tim razia gabungan yang memberikan nasihat dan arahan dengan adanya pamflet mengenai perda di perempatan jalan di Kabupaten Mojokerto. Untuk melakukan razia di jalanan kami sangat membutuhkan bantuan dari pihak kepolisian, denpom, satpol-PP, kejaksaan dan pengadilan guna memperkuat kami untuk melakukan kegiatan saat di jalanan” (Wawancara: Selasa, 12 April 2016).

Berdasarkan petikan wawancara Bapak Liyanto diatas menunjukkan bahwa strategi pertama yang dilakukan untuk mengeluarkan anak jalanan dari lingkungan jalanan yaitu penanganan oleh tim razia gabungan untuk memberikan arahan kepada anak jalanan dengan melakukan dialog kepada anak jalanan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Zainul selaku seksi pemulihan yang bertugas langsung terjun di lapangan menjelaskan sebagai berikut.

“Anak jalanan harus dikeluarkan dari jalanan karena anak adalah aset bangsa jika generasi

bangsa tidak cerdas dan mempunyai budaya yang buruk maka akan berdampak juga bagi masa depan bangsa, kami sebagai instansi pemerintah wajib melakukan penanganan anak jalanan agar mereka bisa menjadi anak yang lebih berdaya dan tupoksi bidang kami wajib menindak lanjuti dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan bukan pada sanksi misal pada pelanggaran perda tentang ketertiban mengenai orang yang memberi uang pada anjal. Untuk itu kami membutuhkan bantuan pihak satpol PP, polisi dan oknum berwajib untuk dukungan dan dapat mengantisipasi terjadinya perlawanan dari anjal” (Wawancara: Rabu, 13 April 2016).

Sosialisasi

Strategi pengentasan anak jalanan yang pertama dengan melakukan sosialisasi, sosialisasi merupakan sosialisasi yang dilakukan secara dadakan dengan datang ke lokasi yang menjadi titik utama anak jalanan mencari nafkah dan berkomunikasi langsung untuk memberikan nasehat, motivasi dan membujuk mereka agar tidak menjadi anak jalanan. Tiga titik utama yang menjadi tempat *mangkal* anak jalanan yaitu perempatan Kenanten, perempatan Puri, dan perempatan Sooko. Secara tidak langsung sosialisasi ini berkaitan dengan upaya penyadaran anak jalanan untuk meninggalkan jalanan karena dinas sosial telah memberikan nasihat dan menyuruh secara halus anak jalanan untuk meninggalkan jalanan dengan menjelaskan mengenai bahaya jalanan bagi anak-anak seusia mereka. Strategi yang dilakukan oleh tim razia gabungan dijelaskan oleh Bapak Liyanto,

“Strategi yang dilakukan tahap awal itu persuasif yang artinya sosialisasi langsung di jalanan dengan memberikan arahan kepada anak jalanan langsung mbak kadang juga kami memberi mereka nasi bungkus sambil mengobrol, jadi langsung terjun ke jalanan untuk membujuk anak untuk meninggalkan jalanan dengan menjelaskan bahaya dan kerugian yang dialami jika mereka tetap tinggal mencari uang di jalanan” (Wawancara: Selasa, 12 April 2016).

Berdasarkan petikan wawancara Bapak Liyanto diatas menunjukkan bahwa strategi pertama yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten Mojokerto terutama oleh bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan pencegahan secara langsung di jalanan oleh tim razia gabungan. Melakukan dialog dengan anak jalanan untuk mengajak mereka meninggalkan jalanan dan kembali ke rumah. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Heriwanto selaku sekretaris Dinas Sosial yang menjelaskan mengenai sosialisasi non-formal oleh tim razia gabungan.

“Awalnya membujuk mereka untuk meninggalkan jalanan dengan menyadarkan pikiran mereka, jika tidak bisa maka dilakukan razia oleh tim gabungan secara dadakan yang terdiri dari dinas sosial, satpol PP, kepolisian, denpom, kejaksaan, pengadilan negeri serta dinas kesehatan yang akan membantu dalam pemeriksaan kesehatan untuk anak jalanan”

(Wawancara: Senin, 18 April 2016).

Selain itu, anak jalanan juga diperlakukan baik dan tidak diperlakukan kasar oleh tim razia gabungan, karena anak jalanan tetaplah anak pada umumnya yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan. Anak jalanan diperlakukan layaknya teman dengan mengajak mereka mengobrol dan tidak melakukan tindakan yang bisa membuat anak jalanan takut, sehingga dengan mudah mengajak mereka secara halus untuk meninggalkan jalanan dan kembali ke rumah. Nasehat ini disampaikan secara halus, karena jika dengan kasar maka anak jalanan malah tidak menghiraukan seperti penuturan Bapak Heriwanto dan Bapak Zainul yang menjelaskan tentang pemberian nasehat dan himbauan kepada anak jalanan secara halus sebagai berikut kutipan wawancara dengan Bapak Heriwanto,

“Saat sosialisasi non-formal tim razia terjun ke titik-titik yang banyak dipakai anjal untuk beroperasi untuk mendekati anjal tapi tidak menakuti mereka, membujuk secara halus dan tidak melakukan tindakan yang membuat anjal takut dan menghindar, kalau menghindar akan semakin susah dalam penanganan lanjutan”

(Wawancara: Kamis, 19 Mei 2016).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Zainul sebagai berikut.

“Dalam melakukan sosialisasi non-formal anjal diajak ngobrol mbak yang intinya menasehati secara halus dan menyuruh mereka untuk pulang ke rumah, se bisa mungkin kami masuk ke lingkungan jalanan agar anjal tidak merasa takut dan risih dengan kehadiran kami, walaupun terkadang saat ditanyai asalnya dari mana masih ada yang tidak mau diajak berbicara tapi tetap kami perlakukan dengan baik..namun setelah dijelaskan mengenai tugas kami disini maka mereka mau untuk berbicara”(Wawancara: Rabu, 25 Mei 2016).

Dapat disimpulkan dari pemaparan Bapak Heriwanto dan Bapak Zainul bahwa sosialisasi non-formal harus dilakukan sebelum membawa anjal ke kantor dinas sosial Kab. Mojokerto untuk penanganan selanjutnya. Sosialisasi non-formal dengan melakukan dialog atau komunikasi dengan anak jalanan secara langsung membujuk dan menasehati mereka secara halus agar mau meninggalkan jalanan yang menjadi tempat mereka hidup atau mencari uang. Dalam sosialisasi non-formal anak jalanan diajak berkomunikasi oleh tim gabungan dan mereka dianggap

sebagai subyek yang sadar sehingga dalam penanganan melibatkan pendapat dan respon dari anak jalanan. Tim razia gabungan menganggap anak jalanan sebagai teman agar mempermudah memperoleh informasi awal mengenai asal anak jalanan. Setelah dilakukan sosialisasi non-formal, tim razia gabungan melakukan pemantauan langsung ke jalanan. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan anak jalanan, karena terkadang anak jalanan mengabaikan arahan dan nasehat yang dilakukan oleh tim razia gabungan dan pihak dinas sosial untuk membujuk mereka meninggalkan jalanan. Tidak jarang juga jika jumlah anjal semakin bertambah karena banyak dari mereka yang mengajak temannya untuk ikut mencari nafkah di jalanan, sehingga harus dilakukan tindakan lanjutan oleh tim razia gabungan.

a. Razia

Razia dilakukan oleh tim gabungan yang telah disepakati bersama dalam keputusan Bupati Mojokerto yang telah ditetapkan pada tanggal 4 februari tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Operasi Razia PMKS di Kabupaten Mojokerto. Razia ini bertujuan menjaring keberadaan PMKS khususnya anak jalanan guna dilakukan rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya secara wajar dengan diberikan bimbingan, pembinaan, pelatihan oleh dinas sosial kabupaten Mojokerto sebagai instansi yang terkait dengan permasalahan sosial. Razia sangat diperlukan untuk menjangkau seluruh anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah demi memperjuangkan hak-hak mereka yang mungkin selama ini masih terabaikan. Razia dilakukan dengan tidak terjadwal (tidak rutin) namun yang pasti akan diadakan razia untuk menjaring anak jalanan. Apabila razia telah dilaksanakan, anak jalanan yang tertangkap dibawa ke kantor dinas sosial untuk melakukan tes kesehatan dan pendataan terkait data diri, penyebab mereka terjun ke jalanan. Melalui hal ini anak dipaksa untuk ikut ke kantor Dinas Sosial Kab. Mojokerto untuk penanganan lebih lanjut agar mereka bisa sadar jika berada dalam masalah yang cukup besar melalui wawancara langsung dan diagnosis masalah yang dilakukan oleh tim razia. Selain tim razia, tim medispun juga andil untuk memeriksa kesehatan anak jalanan terkait penyakit, tes narkoba dan tes virus HIV. Bapak Zainul menjelaskan bahwa perlu dilakukan razia di jalanan.

“Razia dilakukan untuk membawa anjal ke kantor guna melakukan pendataan terkait data diri, faktor penyebab menjadi anak jalanan dan pelatihan yang diinginkan untuk dilakukan tindakan lanjutan berupa pelatihan sesuai bakat dan minat anak jalanan yang dilakukan selama 10 hari pelatihannya dengan melibatkan tim ahli yang

dapat memandu anak jalanan untuk mengembangkan kreativitasnya dan bakat minatnya”(Wawancara: Rabu, 13 April 2016).

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat dianalisis bahwa setelah dilakukan tahap sosialisasi non-formal di jalanan dan dirasa belum mampu menyadarkan pikiran anak jalanan maka dilakukan razia gabungan yang terdiri dari pihak dinas sosial, satpol PP, polisi dan denpom untuk membawa PMKS lainnya termasuk anak jalanan ke kantor dinas sosial kab. Mojokerto. Razia yang dilakukan tidak terjadwal atau dadakan agar jadwal razia tidak bocor dan diingat tanggalnya oleh anak jalanan, namun yang pasti razia dilakukan pada siang hari dan sore hari. Razia harus dilakukan untuk dapat membawa anak jalanan ke kantor Dinas Sosial Kab. Mojokerto guna mendapatkan penanganan lebih lanjut seperti yang disampaikan oleh Bapak Heriwanto sebagai berikut.

“Razia dilakukan untuk membawa anjal ke kantor, walaupun kadang banyak anjal yang telah di razia memohon agar tidak dibawa kantor tapi tetap harus dibawa karena sudah prosedurnya seperti itu dan kami tidak melakukan pemaksaan secara kasar tapi secara halus karena untuk mengeluarkan anjal dari jalanan itu harus dirazia dahulu agar dapat melakukan tindakan penanganan lebih lanjut”(Wawancara: Kamis, 19 Mei 2016).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Liyanto bahwa razia ini dilakukan untuk mengeluarkan anak jalanan dari lingkungan yang membahayakan dan untuk melakukan penanganan lebih lanjut, penuturan Bapak Liyanto sebagai berikut.

“Tujuan utama dari razia yaitu untuk bisa mengamankan anjal ke kantor sehingga mempermudah dalam melakukan pendataan, pembinaan, dan bisa melakukan diagnosis masalah anjal dengan tepat. Dengan itu kami dapat menanganai anak jalanan merubah mental mengemis menjadi berusaha dan bekerja secara halal dan mandiri dengan mengandalkan kemampuan yang mereka miliki” (Wawancara: Rabu, 25 Mei 2016).



Gambar 1 Anak jalanan dibawa ke Dinas Sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heriwanto dan Bapak Liyanto dapat dianalisis bahwa dalam razia yang dilakukan oleh tim razia gabungan hanya bersifat

searah artinya anak jalanan tidak diberikan kesempatan untuk menolak dan harus patuh kepada tim razia untuk dibawa ke kantor Dinas Sosial Kab. Mojokerto. Sehingga dalam hal ini anak dijadikan sebagai obyek yang hanya menerima perlakuan dari tim dan tidak bisa menolak dengan mengeluarkan pendapat atau gagasannya. Namun perlakuan tim razia gabungan terhadap anak jalanan penuh kasih sayang dengan menghargai anak jalanan layaknya anak pada umumnya seperti gambar diatas dapat diketahui bahwa dalam membawa anak jalanan ke kantor, pihak tim razia gabungan atau Dinas Sosial Kab. Mojokerto tidak berlaku kasar kepada mereka seperti menarik-narik dan menyuruh mereka jongkok namun dengan mengandeng mereka.

b. Pendataan Anak Jalanan

Anak jalanan yang telah dibawa ke kantor Dinas Sosial Kab. Mojokerto diberikan pengarahan dan dilakukan pendataan untuk mengetahui asal usul, tempat tinggal, pendidikan terakhir, masalah yang dihadapi, faktor penyebab ke jalanan, keluarga, dan masalah kesehatan. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui masalah sebenarnya yang dihadapi oleh anak jalanan sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat untuk mereka. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Heriwanto sebagai berikut.

“Anjal akan didata mengenai faktor penyebab mereka ke jalanan, agar kami mengetahui penyebab utamanya apakah berasal dari keluarga, ajakan teman atau karena dirinya sendiri yang malas sehingga dengan hal ini kami bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dengan pendekatan yang tepat dengan melakukan identifikasi dulu, pendataan, mengetahui masalahnya lalu dilakukan penanganannya mbak” (Wawancara: Senin, 18 April 2016).

Petikan wawancara Bapak Heriwanto diatas menjelaskan bahwa anak jalanan yang telah di razia dibawa ke kantor dinas sosial kabupaten Mojokerto untuk dilakukan pendataan data diri agar memudahkan pelacakan tempat tinggal dan asal usul mereka. Selain itu, untuk anak jalanan yang menunggu untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan diminta untuk menunggu diatas kursi dan diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang. Apabila pendataan telah dilakukan maka ada tahapan selanjutnya seperti yang disampaikan oleh bapak Liyanto sebagai berikut.

“Sesudah pendataan dapat diketahui penyebab anjal dan kategori anjal untuk selanjutnya anjal melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan pengisian surat pernyataan dan memilih pelatihan yang sesuai dengan bakat minatnya agar dapat dilakukan pelatihan dan pembinaan lebih lanjut dengan menyuruh mereka menginap sehari

semalam di aula dinas mbak”(Wawancara: Selasa, 12 April 2016).

Berdasarkan petikan wawancara dengan Bapak Heriwanto dan Bapak Liyanto dapat diketahui bahwa pendataan dilakukan untuk mengetahui kategori anak jalanan apakah mereka anak yang masih tinggal dengan orang tua ataukah anak terlantar sehingga mempermudah dalam penanganan yang akan dilakukan namun dengan syarat anak jalanan harus tinggal di kantor dinas sosial kabupaten Mojokerto selama sehari semalam.

Berdasarkan petikan wawancara diatas menunjukkan bahwa setelah razia, anak jalanan yang tertangkap dibawa ke kantor Dinas Sosial Kab. Mojokerto untuk dilakukan pendataan terkait identitas diri, alasan terjun ke jalanan, berapa lama mereka di jalanan, dan pelatihan seperti apa yang diinginkan. Pendataan yang dilakukan berdasarkan instrumen yang sudah disiapkan oleh dinas sosial kabupaten Mojokerto dengan bantuan pihak kepolisian untuk mendampingi agar anak jalanan patuh dan menjelaskan apa yang sebenarnya karena tidak jarang dari mereka yang berbohong dan memalsukan identitas diri. Dengan itu, dapat disimpulkan anak jalanan tersebut termasuk anak terlantar atau anak jalanan dari keluarga yang tinggal di jalanan sehingga dapat diberikan penanganan yang sesuai. Selain itu adanya pemeriksaan kesehatan dan melihat adanya penyebaran penyakit berbahaya atau tidak, jika ada maka akan segera diobati oleh tim medis. Hal yang lain terkait pendataan anak jalanan juga disampaikan oleh Bapak Liyanto sebagai berikut.

“Proses pendataan melibatkan peran aktif anak jalanan untuk mau menjelaskan semua masalah yang dialami dan keluhannya mbak, kami sangat menghargai apapun yang ingin disampaikan oleh anak-anak, mulai dari faktor penyebab mereka terjun ke jalanan hingga cerita singkat mereka di jalanan, dalam pendataan anak diwawancara satu persatu oleh tim dan yang lain diminta untuk menunggu gilirannya dipanggil, hal ini efektif untuk mendiagnosis masalah yang dihadapinya agar penanganan dapat maksimal” (Wawancara: Rabu, 25 Mei 2016).

Penyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Zainul tentang keterlibatan anak jalanan dalam menentukan pilihannya sendiri terkait dengan pelatihan yang sesuai dengan minat mereka sebagai berikut.

“Tujuan kami membiarkan anjal memilih pelatihan sesuai bakat minatnya agar mereka antusias mengikuti pelatihan. Selain itu setiap anak juga tidak sama dalam bakat dan minatnya sehingga kami membiarkan mereka memilih sesuai keinginannya tidak dengan paksaan dari kami selain itu juga menanyai mereka secara langsung dan meminta mereka bercerita singkat

mengenai kisah hidupnya. Pendataan dilakukan satupersatu jadi anjal yang belum dipanggil diminta untuk menunggu di Aula mbak” (Wawancara: Rabu, 25 Mei 2016).

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Liyanto dan Bapak Zainul dapat dianalisis bahwa dalam pendataan juga melibatkan anak jalanan untuk memilih jenis pelatihan yang ingin diikuti tanpa memaksa mereka, artinya anak jalanan dianggap sebagai subyek sadar yang mampu menentukan pilihan sendiri untuk menemukan jati dirinya. Selain itu pendataan pelatihan bakat dan minat yang diinginkan oleh anak jalanan ini dilakukan dengan tujuan agar anak jalanan antusias mengikuti pelatihan yang mereka pilih sendiri. Tetapi jika jenis pelatihan yang dipilih tidak ada, maka anak diminta untuk mengikuti pelatihan lain yang mereka sukai. Dalam pendataan anak jalanan ditangani langsung satu per satu untuk mengetahui masalah yang mereka hadapi dengan diminta untuk bercerita kisah hidupnya secara singkat dan penyebab mereka ke jalanan, anak jalanan diperlakukan dengan baik dengan menyuruh mereka duduk diatas kursi dan disediakan minum untuk mereka jika lelah menunggu.

Menghilangkan Mental Mengemis Anak Jalanan

Anak jalanan perlu diberikan pembinaan untuk menghilangkan mental mengemis dan tidak mau berusaha pada anak jalanan. Pembinaan dilakukan setelah pendataan yang dilakukan tim razia gabungan dengan meminta anak jalanan mengisi data diri pada lembar instrumen yang telah disediakan. Pembinaan dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada anak jalanan dengan bantuan dari pihak kepolisian, tokoh agama dan psikolog. Pihak kepolisian memberikan arahan terkait masalah eksploitasi anak, narkoba, dan bahaya lalu lintas jika mereka ada di jalanan. Psikolog membantu dalam memberikan pengarahan mental agar anak jalanan sadar posisi mereka sebagai anak yang mempunyai masalah karena pekerjaan yang tidak layak untuk mereka. Serta tokoh agama memberikan arahan bersifat spiritual untuk menggugah hati nurani anak jalanan supaya ingin berubah menjadi manusia yang lebih baik.

Pembinaan dilakukan selama 24 jam di aula Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan pembinaan mental, hukum dan spiritual untuk memberikan arahan dan mengajak anak jalanan agar menjauh dari jalanan dan dapat mencari pekerjaan yang layak, dalam pembinaan pihak dinas sosial mengupayakan adanya kesadaran dari mereka agar benar-benar mengentaskan diri dari jalanan, karena jika dari anak jalanan sadar bahwa mereka ada dalam masalah yang besar maka dengan kesadaran kritisnya mereka akan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dalam hal ini pihak dinas sosial kabupaten

Mojokerto membantu mereka untuk mencari jalan keluar seperti memberikan mereka bekal ketrampilan untuk membuka peluang usaha dan mampu menghasilkan uang tanpa harus mengemis dan mengamen di jalanan.

Pembinaan mental

Anak jalanan hidup dengan beban yang tidak dimiliki anak pada umumnya, mereka tidak boleh distigma sebagai sampah masyarakat, penyebab onar bahkan sakit jiwa. Namun, dengan menghitung logika beban jiwa yang harus mereka hadapi, mereka dengan mudahnya dipengaruhi pergaulan bebas, perilaku menyimpang, bahkan hingga terganggu jiwanya. Secara psikologis, psikologis anak jalanan terganggu karena permasalahan yang kerap dihadapi anak-anak tersebut sangat kompleks, jadi diperlukan pembinaan mental seperti pendapat Bapak Liyanto sebagai berikut.

“Psikolog memberikan konseling kepada anak jalanan dengan presentasi seputar penyadaran mental anak jalanan agar bisa mengontrol sikap antisosial, kenakalan remaja, berfikir luas sehingga tidak menganggap bahwa mengemis, mengamen bukan satu-satunya cara mereka bertahan hidup, selanjutnya psikolog juga mengajak komunikasi anjal dan melihat gejala-gejala anjal yang kebanyakan dipengaruhi oleh lingkungan sosial bukan kemauan dari diri sendiri. Kadang psikolog melakukan pendekatan satu-satu, kadang juga langsung umum jadi satu. Hambatannya psikolog Cuma satu mbak yang terlibat sehingga untuk pendekatan satu-satu kurang efektif secara waktunya” (Wawancara: Selasa, 12 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Liyanto dapat dianalisis bahwa pembinaan mental juga dilakukan oleh psikolog yang membantu menyadarkan mental anak jalanan, Karena anak jalanan yang sudah terlena oleh mudahnya mencari uang dijalanan membuat mereka tidak mau bekerja keras dan menghalakan segala cara untuk mendapatkan uang. Untuk membantu anak jalanan dalam permasalahan yang dihadapi, dinas sosial kabupaten Mojokerto melakukan pembinaan mental dengan dibantu oleh psikolog yang akan memberikan arahan, konseling dan nasehat kepada anak jalanan untuk mengenali jati dirimya, kemampuan yang dimiliki dan menyadarkan mereka bahwa mereka sebenarnya ada dalam masalah besar yang harus segera diatasi. Pembinaan mental dibantu oleh psikolog yang memberikan konseling kepada anak jalanan dengan presentasi seputar penyadaran mental anak jalanan agar bisa mengontrol sikap antisosial, kenakalan remaja, berfikir luas sehingga tidak menganggap bahwa mengemis, mengamen bukan satu-satunya cara mereka bertahan hidup, serta pendekatan yang menghindarkan mereka dari depresi, dan gangguan jiwa.

Pembinaan hukum

Pembinaan hukum dilakukan untuk menyadarkan anak jalanan mengenai masalah eksplorasi, ancaman dijalanan, dan hal-hal yang membahayakan mereka ketika di jalanan, karena anak jalanan tidak hanya membutuhkan penyadaran mental saja tanpa adanya penyadaran hukum seperti bahaya yang ada dijalanan, pembinaan dilakukan agar anak jalanan dapat paham dan mampu memecahkan masalah hidupnya. Pembinaan hukum dilakukan oleh tim Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan bantuan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan arahan kepada anak jalanan, hal ini secara tidak langsung menyuruh mereka untuk meninggalkan jalanan sebagai tempat mencari uang karena jalanan bukan tempat yang layak bagi anak seusia mereka yang rentan oleh berbagai macam masalah. Bapak Heriwanto menjelaskan sebagai berikut.

“Banyak sekali bahaya yang harus dihadapi oleh anak jalanan bisa karena mereka kurang berpendidikan sehingga mudah dipengaruhi tawuran dan membahayakan keselamatan diri karena ketika mereka mengemis atau mengamen di jalan raya karena terkadang banyak oknum preman yang malak dan meminta jatah harian kepada anjal, selain itu mereka juga rentan dieksplorasi, sehingga saat pembinaan kami juga meminta bantuan pihak kepolisian untuk ikut serta memberikan arahan kepada anjal” (Wawancara: Senin, 18 April 2016).

Berdasarkan kutipan wawancara dari Bapak Heriwanto diatas bahwa anak jalanan mengalami masalah yang cukup serius berkaitan dengan ancaman nyawanya karena berurusan dengan preman dan rentannya tindakan eksplorasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Liyanto.

“Polisi juga membantu dalam kegiatan pembinaan anjal mbak, kontribusinya dengan memberikan arahan terkait bahaya jika mengamen di perempatan jalan, pelanggaran lalu lintas, bahaya pengaruh dari miras, narkoba, serta menjelaskan mengenai eksplorasi dan tindak kekerasan pada anak yang dapat diberikan sanksi hukum. Jadi intinya memberikan pengetahuan tentang peraturan hukum yang mungkin belum diketahui oleh anak jalanan” (Wawancara: Selasa, 12 April 2016).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pembinaan hukum dibantu oleh pihak kepolisian untuk memberikan arahan, dan informasi mengenai bahaya di jalanan, bahaya narkoba, sanksi hukum dari tindakan kriminal dan bahaya mereka tinggal di jalanan. Hal tersebut diharapkan mampu menyadarkan anak jalanan mengenai bahaya dan resiko di jalanan, sehingga muncul kesadaran kritis mereka untuk benar-benar meninggalkan jalanan dan mencari nafkah yang halal dan

tempat yang aman tanpa resiko yang berbahaya. Pembinaan ini lebih menekankan pada pemberian informasi mengenai jalanan dengan berbagai bahaya yang mengancam.

Pembinaan Spiritual

Pembinaan spiritual diperlukan untuk menyadarkan anak jalanan dari dalam dengan menyentuh perasaan, akal budi dan hati nuraninya, untuk merubah manusia perlu juga dilakukan pendekatan secara spiritual (agama) bahwa manusia harus bisa menganggap cobaan hidup merupakan masalah yang harus dihadapi dengan usaha serta kerja keras bukan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri karena takdir Tuhan. Pembinaan spiritual untuk mengentas anak jalanan dibantu oleh Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan jajaran ustadz yang memberikan mereka doktrin agama agar dapat berpikir kritis mengenai takdir. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Liyanto sebagai berikut.

“Ada ceramah agama oleh pihak MUI, Kesra, yang memberikan ceramah agama yang termasuk dalam bimbingan spiritual kepada anjal mbak, karena kita sebagai manusia pasti memiliki hati nurani yang memegang agama, manusia juga akan tersentuh hatinya jika dilakukan pendekatan dari dalam dengan diberikan siraman rohani yang secara tidak langsung mempengaruhi anjal untuk berubah menjadi lebih baik lagi, jadi yang melakukan pembinaan spiritual ini ganti-ganti mbak tiap tahunnya” (Wawancara: Selasa, 12 April 2016).

Pembinaan spiritual didasarkan pada manusia sebagai makhluk beragama yang harus mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan, karena dirasa pembinaan mental dan hukum belum cukup untuk menyadarkan anak jalanan secara mendalam dan menyentuh hati nurani mereka, kesadaran kritis timbul karena mereka mengetahui jika berada dalam masalah tergugah untuk mengentaskan diri dari masalah yang dihadapi, dalam hal ini hati nurani mempunyai andil untuk mengontrol perilaku manusia sehingga sangat diperlukan pengadaan pembinaan spiritual untuk memberikan ceramah dan tauziah yang dibungkus secara tersirat dalam pemberian arahan, nasihat dan motivasi. Pembinaan spiritual atau agama yang melibatkan pihak Kesehatan Masyarakat (kesra), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pak kyai untuk memberikan penyadaran agama sebagai pondasi utama manusia hidup di dunia. Penyadaran spiritual diharapkan dapat menggugah hati nurani anak jalanan agar bisa mengentaskan diri karena masa depan ditentukan usaha yang halal dan do'a. Mekanisme dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dijelaskan oleh Bapak Heriwanto sebagai berikut.

“Pembinaan dilakukan dengan mengundang pihak terkait guna memberikan arahan dan pengetahuan kepada anak jalanan dengan berceramah didepan aula menggunakan LCD, menjelaskan kepada anak jalanan mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema yang dibicarakan mengenai aturan hukum, masa depan anak, serta siraman rohani. Pembinaan dan pelatihan dilibatkan orang yang ahli dibidangnya mbak, kalau jahit ya instruktur jahit kalau masak ya koki, jadi sesuai bidangnya baik narasumber pembinaan atau pelatihan” (Wawancara: Senin, 18 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat dianalisis bahwa proses pembinaan tidak menekankan pada komunikasi atau dialog diantara anak jalanan dan pemateri dalam hal ini pihak psikolog, kepolisian dan ustaz, melainkan menggunakan metode ceramah seperti bercerita didepan aula kepada anak jalanan, tentu orang yang bercerita memandang orang disekelilingnya adalah pendengar, dalam hal ini anak jalanan dianggap sebagai obyek yang mendengarkan materi dari pemateri didepan aula bukan sebagai subyek yang mempunyai dala nalar untuk berpartisipasi, berpikir dan punya kebebasan dalam menuangkannya melalui kata-kata karena pemateri dianggap tahu segalanya yang anak jalanan tidak tahu apa-apa sehingga anak tidak diikutsertakan secara aktif dalam proses memahami dan menghadapi masalah.

Pelatihan Ketrampilan

Pelatihan dilakukan setelah selesainya kegiatan pembinaan dan pengarahan untuk anak jalanan, pelatihan diberikan sesuai dengan pertimbangan dari hasil pendataan terkait dengan ketrampilan yang paling banyak diinginkan oleh anak jalanan. Pada dasarnya pelatihan ketrampilan ini dibedakan untuk laki-laki dan untuk perempuan, namun jika dari mereka ingin mengikuti dua-duanya akan diperbolehkan juga. Pelatihan ketrampilan secara tidak langsung menggambarkan bahwa pihak dinas sosial kabupaten Mojokerto ingin memberikan latihan untuk mengembangkan potensi diri yang bisa mereka gunakan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya. Pelatihan berupa bekal ketrampilan yang diberikan oleh dinas sosial kabupaten Mojokerto disampaikan oleh Bapak Liyanto sebagai berikut.

“Pelatihan yang diberikan sesuai dengan suara terbanyak dari pendataan mbak, kemarin kami memberikan pelatihan teknik dasar servis sepeda motor untuk anjal laki-laki dan tata boga untuk anjal perempuan yang diharapkan mampu memberikan ketrampilan dan mengembangkan bakat anak jalanan. Pelatihan diberikan untuk anjal yang sudah cukup umur, setelah pelatihan anjal diberikan stimulan berupa alat untuk

berwirausaha" (Wawancara: Selasa, 12 April 2016).



Gambar 2 Pelatihan teknik dasar servis sepeda.

Berdasarkan petikan wawancara Bapak Liyanto diatas menjelaskan bahwa pelatihan untuk anak jalanan dilakukan berdasarkan pilihan terbanyak ketika pendataan anak jalanan. Sehingga jika bakat dan minat anak yang menginginkan pelatihan tertentu tidak ada, maka anak tetap disuruh mengikuti pelatihan yang telah disediakan. Pelatihan yang dilakukan pada bulan desember tahun 2015 yaitu pelatihan tentang teknik dasar servis sepeda motor untuk laki-laki dan pelatihan tata boga untuk perempuan.



Gambar 3 Pelatihan Tata Boga

Melalui pelatihan ketrampilan ini anak jalanan diharapkan sadar dengan potensi diri yang mereka miliki dan dapat berwirausaha sebagai bekal masa depan mereka yang harus diperjuangkan dengan bekerja keras, karena menjadi anak jalanan bukan pilihan yang sangat layak untuk menggapai masa depan cerah seperti yang mereka impikan. Oleh karena itu, pihak Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto memberikan pelatihan sesuai dengan minat anak jalanan, tetapi jika pelatihan yang dilakukan hanya sedikit dan tidak bisa menampung semua aspirasi anak, maka anak tetap harus mengikuti pelatihan yang telah disediakan, pada tahun 2015 lalu untuk anak jalanan laki-laki diberikan pelatihan servis sepeda, dan untuk anak jalanan perempuan diberikan pelatihan tata boga, adapun pelatihan kewirausahaan untuk PMKS lainnya seperti berjualan es tebu, berjualan nasi bungkus, membuka usaha penggilingan tepung dan kopi. Pernyataan Bapak Liyanto ditambahkan oleh Bapak Zainul sebagai berikut.

"Saat pelatihan selama 10 hari ini anak diajarkan teori dan praktek secara runtut, anak jalanan diberikan contoh oleh tim ahli lalu dibuka sesi tanya jawab dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk unjuk bakat dan

potensi dengan mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh tim ahli, hasilnya pun tidak mengecewakan anjal dapat melakukan pelatihan dengan baik meskipun perlu pendampingan pada saat pelatihan namun hasil akhir yang ditunjukkan oleh anak jalanan sangat memuaskan. Jika pelatihan yang kami selenggarakan berjalan lancar maka tujuan yang hendak dicapaipun insyaallah bisa dengan mudah yaitu mengentaskan anak dari jalanan" (Wawancara: Rabu, 13 April 2016).

Berdasarkan kutipan wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa dalam proses pelatihan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto melibatkan anak jalanan untuk berperan aktif dalam mempraktekkan arahan dan urutan yang telah diberikan dan diajarkan oleh tim ahli. Sebelum mempraktekkan, anak jalanan diajak berkomunikasi dan tanya-jawab tentang pemahaman mereka terkait arahan yang diberikan sebagai awalan pelatihan, jika kesulitan mereka telah diatasi maka langsung mengajak anak jalanan melakukan sendiri seperti apa yang telah dicontohkan oleh tim ahli. Sehingga dalam proses ini anak jalanan diposisikan sebagai subyek yang mempunyai potensi karena antara tim ahli dan anak jalanan saling melakukan komunikasi dan bekerja sama guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Anak jalanan tidak hanya dijelali arahan dan materi namun diajak memecahkan masalah yang dihadapi dan mempraktekkan sendiri dengan kemampuan mereka untuk membuat suatu produk.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan anak jalanan setelah dilakukan pembinaan dan pelatihan di Dinas Sosial Kab. Mojokerto, hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad selaku tim dari pekerja sosial perlindungan anak yang langsung terjun ke rumah anak guna melakukan pemantauan sebagai berikut.

"Tim Peksos Perlindungan Anak melakukan pemantauan masalah yang berkaitan dengan anak, mulai dari masalah anak eks-gafatar yang baru-baru ini marak, selain itu kami juga memantau ke rumah anak jalanan yang telah diberikan pembinaan dan pelatihan, mulai dari pendidikan, kebutuhan gizi, perkembangan setelah pembinaan dan pelatihan, serta melihat apakah anak kembali lagi ke jalanan, kami melakukan tugas sesuai prosedur dengan mengurus surat izin dari kecamatan dan desa sebelum memantau ke rumah yang bersangkutan, jika didapati anak kembali lagi ke jalanan maka kami akan melapor pada bidang resos untuk segera dilakukan tindakan selanjutnya" (Wawancara: Senin, 12 April 2016).

Berdasarkan kutipan wawancara dari Bapak Ahmad dapat dianalisis bahwa pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan anak jalanan yang telah diberikan

pembinaan dan pelatihan. Kegiatan pemantauan ini sebagai tindakan dinas sosial kabupaten Mojokerto untuk melihat apakah anak telah berhenti menjadi anak jalanan, telah bersekolah lagi dan melakukan wirausaha yang lebih layak untuk mereka. Melalui aksi ini, anak jalanan akan sadar bahwa tidak hanya dirinya yang menginginkan dan memperjuangkan sendiri masa depan yang cerah dengan mencari nafkah yang lebih layak. Pemantauan dilakukan oleh pekerja sosial perlindungan anak yang memantau anak dengan berbagai permasalahannya, salah satunya permasalahan anak jalanan. Pekerja sosial langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan dengan mendatangi rumah anak yang bersangkutan sesuai prosedur melakukan izin ke kecamatan, ke desa dan langsung monitoring ke keluarga yang bersangkutan.

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan terakhir anak seusai mengikuti pembinaan dan pelatihan, hal ini dilakukan agar bisa mengontrol anak untuk tidak kembali ke jalanan dan memberi kesadaran kepada keluarga untuk mendukung hal positif yang dilakukan oleh anak sehingga mereka dapat hidup normal layaknya anak pada umumnya. Jika pembinaan dan pelatihan yang telah dilakukan dinas sosial gagal atau anak tetap kembali lagi ke jalanan maka akan segera dilaporkan oleh tim pemantau untuk tindakan lebih lanjut oleh dinas sosial kab. Mojokerto.

Hambatan dalam Pengentasan Anak Jalanan

Perencanaan telah dilakukan dalam penerapan strategi dan upaya pengentasan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, namun terkadang masih ada hambatan yang menjadi sedikit masalah dalam kinerja Dinas Sosial. Ada beberapa hambatan yang dialami dilapangan mulai dari hambatan teknis, hambatan anggaran dan hambatan dadakan di lapangan. Adapun hambatan yang berasal dari dalam ataupun dari luar.

Kurangnya Dukungan dari Masyarakat

Pengentasan anak jalanan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, Dinas Sosial, LSM, namun masyarakat harus juga berperan aktif untuk ikut serta dalam upaya pengentasan anak jalanan. Banyak masyarakat yang memberikan uang saat melihat anak mengemis di jalan raya atau tempat umum lainnya, memang merasa iba jika melihat anak seusia mereka yang mencari uang dengan mengemis ataupun mengamen sehingga nurani sebagai manusia tergugah untuk memberikan sedikit rezeki kepada mereka. Namun, jika dilihat dari kacamata sosial hal itu sangat merugikan anak pada jangka panjang, jika mereka mendapat uang banyak dari jalanan, maka akan semakin menggantungkan diri dan enggan meninggalkan jalanan. Wajar jika memberi anak jalanan karena iba, tetapi tidak

jarang dari mereka yang menggunakan uang tersebut untuk berjudi, pesta miras. Hal ini diperjelas oleh pendapat dari Bapak Liyanto sebagai berikut.

“Dengan memberi uang anak jalanan seperti membunuh mereka secara pelan-pelan, karena akan membuat mereka ketergantungan dan keenakan hidup di jalanan. Padahal telah diberikan peringatan dengan pamflet tentang Perda larangan memberi anjal, gepeng serta sanksinya, namun masyarakat tetap banyak yang memberi uang kepada anjal. Menurut saya itu akan berakibat fatal dikemudian hari, jika ingin menyumbang mending ke panti asuhan atau yayasan yang sudah jelas arah uangnya dan banyak manfaatnya. Kalau memberi anjal uang menurut saya itu hal yang kurang baik” (Wawancara: Selasa, 12 April 2016).

Hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Zainul sebagai berikut.

“Salah satu hambatan datang dari pengguna jalan yang biasanya memberikan uang kepada anjal yang mengemis di perempatan, selain mengancam nyawa dan menganggu kelancaran lalu lintas juga dapat menyebabkan efek buruk bagi masa depan mereka yang akan bergantung dan tidak mau berusaha keras dengan mencari nafkah yang lebih layak untuk hidup” (Wawancara: Rabu, 13 April 2016).

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Liyanto dan Bapak Zainul dapat disimpulkan bahwa pemberian uang oleh pengguna jalan dan masyarakat menjadi hambatan dalam pengentasan anak jalanan, karena jika anak jalanan diberikan uang maka mereka akan ketergantungan dan merasa nyaman dengan jalanan yang selalu menyediakan mereka uang. Masyarakat dirasa kurang mendukung pengentasan anak jalanan karena banyak yang memberikan uang saat ada anjal mengemis padahal telah diberikan himbauan disudut perempatan jalan yang melarang masyarakat untuk memberikan uang kepada anak jalanan, namun semua itu masih belum berhasil banyak yang mengabaikan himbauan tersebut dan dianggap sebagai hiasan jalan semata.

Kurangnya Antusiasme Anak Jalanan

Anak jalanan sebagai anak yang harus diperhatikan hak dan kewajibannya, sebagaimana UU perlindungan anak yang menjamin Pemerintah Daerah untuk memperhatikan anak jalanan agar dapat berkembang layaknya anak pada umumnya. Sehingga Dinas Sosial sebagai oknum yang menaungi masalah sosial wajib melakukan penanganan dan pemberdayaan kepada anak jalanan untuk memulihkan hak mereka seperti anak seusia mereka pada umumnya. Namun tidak jarang program yang dilakukan ada yang menyambut kurang antusias, salah satu hambatan dalam pengentasan anak jalanan yaitu kurangnya antusias anak

jalanan untuk diberikan perlakuan dan pemberdayaan lebih lanjut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Zainul sebagai berikut.

“Hambatannya dari anggaran mbak, karena kita tidak hanya menangani anak jalanan tetapi juga wanita harapan, gelandangan dan pengemis jadi anggarannya harus dibagi-bagi, sehingga pelatihan yang kami berikan hanya beberapa saja, padahal keinginan kami memberikan pelatihan yang banyak dan menarik anak jalanan untuk bisa belajar bergabung bersama kami”

(Wawancara: Rabu, 13 April 2016).

Dari petikan wawancara Bapak Zainul diatas dapat diketahui bahwa hambatan juga berasal dari anggaran, karena bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial tidak hanya menangani masalah anak jalanan tetapi juga wanita harapan, gelandangan dan pengemis sehingga anggaran juga harus diatur sesuai kebutuhan. Padahal keinginan dari bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial memberikan pelatihan yang bermacam-macam tidak hanya pelatihan boga, kewirausahaan dan servis. Hambatan yang lain ditambahkan oleh Bapak Heriwanto sebagai berikut.

“Padahal program yang kami lakukan untuk memulihkan martabat mereka, tapi terkadang respon yang diberikan kurang baik misal saat pendataan dan pembinaan mereka asyik sendiri jika kami lengah dari mereka, tetapi alhamdulillahnya antusias mereka tinggi ketika mengikuti pelatihan dari kami mbak”

(Wawancara: Senin, 18 April 2016).

Kurangnya Dukungan dari Keluarga

Selain hambatan dari anak jalanan dan dari masyarakat, adapula hambatan lain yang sempat menganggu program penanganan anak jalanan di Kab. Mojokerto yaitu penanganan anak jalanan yang masih bersekolah, karena ada beberapa orang tua melarang anaknya untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kab. Mojokerto. Hal ini tentu sedikit menganggu program pengentasan anak jalanan. Berdasarkan penuturan Bapak Liyanto sebagai berikut.

“Ada lagi yang sedikit menghambat dalam program pengentasan anjal mbak, yaitu jika kami mendapatkan anjal yang masih sekolah dan keluarganya terkadang tidak mengizinkan anaknya mengikuti pembinaan dan pelatihan di kantor walapun terkadang ada keluarga yang masih mengizinkan sehingga yang tidak mengizinkan dengan pertimbangan lebih lanjut maka ada anjal yang dipulangkan dengan syarat keluarga tidak boleh membiarkan anaknya mengemis di jalanan, dan anjal tersebut harus tetap kami pantau jika tidak diawasi maka akan

cabut lagi ke jalanan” (Wawancara: Senin, 12 April 2016).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Zainul sebagai berikut.

“Anjal yang masih bersekolah itu memiliki beban mental yang cukup berat juga mbak, selain mereka mendapat gunjingan dari teman sekolahnya yang terkadang membuat mereka enggan bersekolah lagi. Namun dalam razia tim gabungan yang medapati adanya anjal yang masih sekolah terkadang anjal tidak diizinkan keluarga untuk ikut pembinaan pelatihan kadang kami pulangkan, namun tetap dipantau jika mereka bandel akan kami kirim langsung ke UPT. Keluarga memiliki peranan yang penting dalam mengontrol tindakan anaknya mbak, ada yang malah menyuruhnya juga menjadi anak jalanan.”

(Wawancara: Rabu, 13 April 2016)

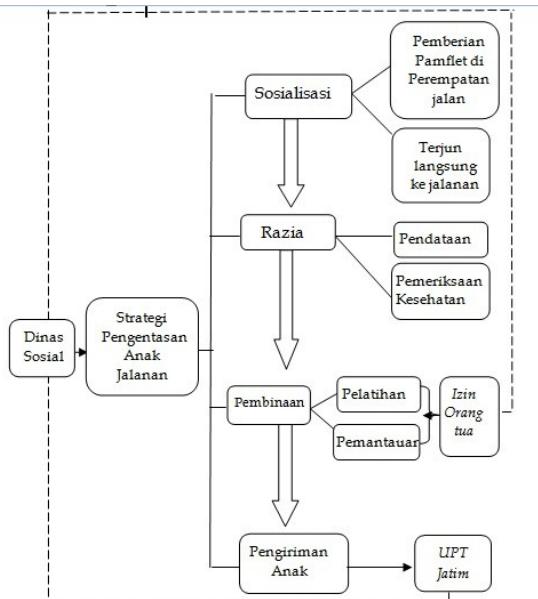
Pernyataan Bapak Zainul didukung dengan yang disampaikan oleh Adik Rizal sebagai berikut.

“Saya mengemis disuruh sama ibu mbak, bapak tukang becak tidak punya cukup uang untuk saku ke sekolah makanya saya disuruh mengemis dan mengamen sama ibu biar bisa dibuat beli jajan dan uang saku sekolah mbak, kadang kalau pulang sekolah saya diantar ke perempatan jalan kadang nebeng sama orang yang naik sepeda motor. Kalau mau ngamen saya janjian dulu sama dua teman saya ini supaya ada temannya ketika ngamen, kalo ada razia saya lari mbak takut dimasukkan ke kantor polisi jadi sampai sekarang saya tidak pernah dibawa ke kantor polisi mbak”

(Wawancara: Sabtu, 16 Januari 2016).

Dari penuturan adek Rizal dapat dilihat bahwa keluarga mempunyai peranan untuk mengendalikan anaknya, walau sebenarnya anak tidak mau mengemis tetapi orang tua berkehendak lain dan memanfaatkan anaknya untuk mengemis di jalanan. seperti yang disampaikan oleh adek Faisal sebagai berikut.

“Saya mengemis disuruh sama bapak mbak, bapak tukang bangunan yang kadang tidak bekerja, kalau tidak dapat uang dari mengemis aku tidak bisa makan mbak, berangkat kesini sama teman-teman kadang juga nebeng sama orang kadang juga jalan kaki. Rumahku dekat sini mbak. Pulang sekolah selalu disuruh mengamen sama bapak, sore jam 5 sebelum magrib baru pulang ke rumah. Kalau pulangnya kemalaman gak berani pulang soale jalanan ke rumah sepi dan kalau pulang kemalaman malah dimarahi” (Wawancara: Sabtu, 16 Januari 2016).



Bagan 1 Skema hasil penelitian

Teori *problem possing education* oleh Paulo Freire menyatakan bahwa manusia mempunyai potensi untuk berkreasi dalam realitas dan untuk membebaskan diri dari penindasan budaya, ekonomi dan politik. Sehingga tujuan utamanya yaitu menciptakan sebuah kesadaran kritis sejalan dengan terciptanya pengembangan sehingga anak akan menjadi tuan dari pemikirannya sendiri dan mampu mengenali kelebihan dan kekurangan dari dirinya sendiri (Hidayat,2013:20). Proses pendidikan pada *Problem possing education* bertujuan untuk mencapai kesadaran kritisnya jika anak dalam pembelajaran dianggap sebagai subyek, menganggap anak mempunyai potensi, adanya dialog dengan anak dalam pembelajaran, mendasarkan tindakan pada cinta dan kasih, sehingga akan menghasilkan tindakan yang penuh kasih sayang. Dinas sosial kabupaten Mojokerto mempunyai strategi pengentasan anak jalanan yang juga mendasarkan pada upaya penyadaran anak jalanan dan pelatihan ketrampilan, karena pelatihan ketrampilan tanpa penyadaran kurang optimal. Jika anak jalanan mempunyai ketrampilan untuk berwirausaha namun tidak memiliki kesadaran akan mengentaskan dirinya dari jalanan maka pelatihan ketrampilan yang dilakukan pun sia-sia. Begitupun sebaliknya, jika anak jalanan hanya disadarkan untuk tidak berada di jalanan tanpa ada solusi penghasilan yang lain atau dengan memberikan ketrampilan maka mereka akan kembali ke jalanan karena tidak memiliki keahlian khusus untuk mencari nafkah. Strategi pengentasan anak jalanan didasarkan pada tindakan dari tim razia gabungan dan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang dilakukan untuk melakukan penanganan anak jalanan.

Tim razia gabungan melakukan sosialisasi, dan sosialisasi dilakukan secara dadakan dengan datang ke lokasi yang menjadi titik utama anak jalanan mencari

nafkah dan berkomunikasi langsung untuk memberikan nasehat, motivasi dan membujuk mereka agar tidak menjadi anak jalanan serta menyuruh secara halus anak jalanan untuk meninggalkan jalanan dengan menjelaskan mengenai bahaya jalanan bagi anak-anak seusia mereka. Tim razia gabungan ini bertujuan menjaring keberadaan anak jalanan guna dilakukan rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya secara wajar dengan diberikan bimbingan, pembinaan, pelatihan oleh dinas sosial kabupaten Mojokerto sebagai instansi yang terkait dengan permasalahan sosial.

Razia sangat diperlukan untuk menjangkau seluruh anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah demi memperjuangkan hak-hak mereka yang mungkin selama ini masih terabaikan. Apabila razia telah dilaksanakan, anak jalanan yang tertangkap dibawa ke kantor dinas sosial untuk melakukan tes kesehatan dan pendataan terkait data diri, penyebab mereka terjun ke jalanan. Melalui hal ini anak dipaksa untuk bisa sadar jika mereka berada dalam masalah yang cukup besar melalui wawancara langsung dan diagnosis masalah yang dilakukan oleh tim razia. Selain tim razia, tim medispun juga andil untuk memeriksa kesehatan anak jalanan terkait penyakit, tes narkoba dan tes virus HIV. Proses razia pada dasarnya memaksa anak keluar dari jalanan dengan membawa mereka ke kantor Dinas Sosial Kab. Mojokerto untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Pada proses razia anak dianggap sebagai objek yang tidak bisa menolak perlakuan dari tim razia gabungan, sehingga anak tidak berdaya dan hanya mengikuti alur dari tim razia gabungan, selain itu juga tidak adanya dialog dengan anak jalanan karena yang ada anak tidak dapat melawan dan protes kepada tim razia gabungan. Namun anak jalanan tetap dianggap mempunyai potensi dapat dilihat dari niat tim razia gabungan yang menginginkan anak jalanan keluar dari jalanan dan dapat bekerja dengan layak. Tim razia gabungan tetap mendasarkan cinta kasih kepada anak jalanan dengan tidak melukai tubuh mereka dan tetap menganggap mereka seperti anak pada umumnya, hanya saja terkadang jika ada anak jalanan yang membangkang akan dipegang tangannya agar tidak lepas dan juga sedikit dibentak.

Pendataan dilakukan untuk dapat melakukan penanganan yang sesuai dengan kategori anak jalanan, mereka dapat dikategorikan menjadi tiga menurut (Hariadi dan Suyanto) yakni Pertama, *children on the street* yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Kedua, *children of the street* yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang

tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Berdasarkan tiga kategori anak jalanan, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto melakukan perlakuan yang sama untuk ketiganya dengan memberikan arahan pembinaan mental, spiritual, dan hukum serta pelatihan ketrampilan. Namun, dari ketiga kategori anak jalanan tersebut ada perbedaan saat penanganan akhir ketika pengiriman anak jalanan ke UPT Jawa Timur, *Children from families of the street* yaitu anak jalanan berasal dari keluarga yang hidup di jalanan akan dikirimkan ke UPT Pasuruan, sedangkan anak terlantar dibawa ke UPT Remaja Terlantar Jombang, kemudian untuk anak jalanan kategori *Children on the street* akan dibawa ke Balai PMKS Sidoarjo. Pada proses pendataan anak jalanan, posisi anak dijadikan sebagai subyek dengan saling berkomunikasi dan meminta anak untuk bercerita mengenai penyebab mereka ke jalanan dan cerita singkat selama di jalanan, sehingga adanya proses dialog dalam kegiatan ini, dan anak juga dianggap mempunyai potensi karena pada pendataan anak akan dihadapkan pada pilihan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Pelakuan yang baik dan didasarkan pada cinta kasih tercermin karena anak tidak dibentak namun ditanyai dengan penuh kesabaran. Selain itu, anak juga diperlakukan dengan baik mulai dengan memberikan tempat duduk untuk mereka ketika menunggu dilakukannya proses pendataan. Namun jika pendataan anak mengenai pelatihan yang ingin diikuti tidak sesuai dengan bakat minat maka anak tetap harus mengikuti pelatihan yang telah dipersiapkan.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto melakukan pembinaan setelah pendataan yang dilakukan tim razia dengan meminta anak jalanan mengisi data diri pada lembar instrumen yang telah disediakan. Pembinaan dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada anak jalanan dengan bantuan dari pihak kepolisian dan psikolog. Pihak kepolisian memberikan arahan terkait masalah eksploitasi anak, narkoba, dan bahaya lalu lintas jika mereka ada di jalanan. Psikolog membantu dalam memberikan pengarahan mental agar anak jalanan sadar posisi mereka sebagai anak yang mempunyai masalah karena pekerjaan yang tidak layak untuk mereka. Pembinaan dilakukan di aula dinas sosial kabupaten Mojokerto dengan pembinaan mental, hukum dan spiritual untuk memberikan arahan dan mengajak anak jalanan agar menjauh dari jalanan dan dapat mencari pekerjaan yang layak, dalam pembinaan pihak dinas sosial mengupayakan adanya kesadaran dari mereka agar benar-benar mengentaskan diri dari jalanan, karena jika dari anak jalanan sadar bahwa mereka ada dalam masalah yang besar maka dengan kesadaran kritisnya mereka akan

mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dalam hal ini pihak dinas sosial kabupaten Mojokerto membantu mereka untuk mencari jalan keluar seperti memberikan mereka bekal ketrampilan untuk membuka peluang usaha dan mampu menghasilkan uang tanpa harus mengemis dan mengamen di jalanan.

Berdasarkan teori problem possing education Paulo Freire mengemukakan bahwa penyadaran sangat diperlukan untuk upaya pembebasan manusia menjadi berdaya, penyadaran yang dimaksud adalah memunculkan kesadaran kritis untuk mampu mengubah hidupnya tanpa bertumpu dengan takdir. Anak jalanan hidup dengan beban yang tidak dimiliki anak pada umumnya, mereka tidak boleh distigma sebagai sampah masyarakat, penyebab onar bahkan sakit jiwa. Namun, dengan menghitung logika beban jiwa yang harus mereka hadapi, mereka dengan mudahnya dipengaruhi pergaulan bebas, perilaku menyimpang, bahkan hingga terganggu jiwanya. Secara psikologis, psikologis anak jalanan terganggu karena permasalahan yang kerap dihadapi anak-anak tersebut sangat kompleks. Bukan hanya sekedar anak jalanan, tetapi kemampuan intelektualnya pun kebanyakan sangat rendah dibanding anak-anak seusianya, rata-rata mereka banyak yang tidak sekolah karena malu dengan ejekan atau *bullying* dari teman sekelas.

Pembinaan yang berkaitan dengan anak jalanan yang sudah terlena oleh mudahnya mencari uang dijalanan membuat mereka tidak mau bekerja keras dan menghalakan segala cara untuk mendapatkan uang. Untuk membantu anak jalanan dalam permasalahan yang dihadapi, dinas sosial kabupaten Mojokerto melakukan pembinaan mental dengan dibantu oleh psikolog yang akan memberikan arahan, konseling dan nasehat kepada anak jalanan untuk mengenali jati dirinya, kemampuan yang dimiliki dan menyadarkan mereka bahwa mereka sebenarnya ada dalam masalah besar yang harus segera diatasi. Pembinaan mental dibantu oleh psikolog yang memberikan konseling kepada anak jalanan dengan presentasi seputar penyadaran mental anak jalanan agar bisa mengontrol sikap antisosial, kenakalan remaja, berfikir luas sehingga tidak menganggap bahwa mengemis, mengamen bukan satu-satunya cara mereka bertahan hidup, serta pendekatan yang menghindarkan mereka dari depresi, dan gangguan jiwa. Pembinaan hukum yang dibantu oleh kepolisian untuk memberikan pengarahan tentang bahaya dijalanan, dan masalah hukum. Sedangkan pembinaan spiritual berkaitan dengan hati nurani anak jalanan. Pembinaan dilakukan dengan ceramah didepan aula dengan menggunakan LCD dan tidak melakukan pendekatan emosional secara langsung tetapi secara umum.

Pelatihan ketrampilan dilakukan setelah selesainya kegiatan pembinaan dan pengarahan untuk anak jalanan, pelatihan diberikan sesuai dengan pertimbangan dari hasil pendataan terkait dengan ketrampilan yang paling banyak diinginkan oleh anak jalanan tetapi jika pilihan pelatihan yang diinginkan tidak terlaksana maka anak jalanan harus tetap mengikuti pelatihan yang lainnya dengan terpaksa. Pada dasarnya pelatihan ketrampilan ini dibedakan untuk laki-laki dan untuk perempuan, namun jika dari mereka ingin mengikuti dua-duanya akan diperbolehkan juga. Pelatihan ketrampilan secara tidak langsung menggambarkan bahwa pihak dinas sosial kabupaten Mojokerto ingin memberikan kesadaran bahwa anak jalanan mempunyai potensi diri yang bisa mereka latih dan kembangkan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya. Melalui pelatihan ketrampilan ini anak jalanan diharapkan sadar dengan potensi diri yang mereka miliki dan dapat berwirausaha sebagai bekal masa depan mereka yang harus diperjuangkan dengan bekerja keras, karena menjadi anak jalanan bukan pilihan yang sangat layak untuk menggapai masa depan cerah seperti yang mereka impikan. Pelatihan keterampilan dilakukan untuk menyadarkan potensi diri yang dimiliki oleh anak jalanan, mengajak mereka untuk unjuk bakat dan minat. Dari kegiatan ini dapat dilihat bahwa anak jalanan dianggap sebagai anak yang mempunyai potensi dan dianggap sebagai subyek dengan bersama mereka melakukan pelatihan keterampilan dengan kata lain mereka diikutsertakan dalam pelatihan melalui praktik. Selain itu, adanya pendampingan oleh tim ahli dan dialog dengan anak jalanan dilokasi pelatihan. Pada saat pelatihan pun tetap didasarkan pada cinta kasih yang memperlakukan anak jalanan dengan baik tanpa adanya kata-kata kasar meskipun terkadang ada anak jalanan yang masih kurang paham dengan pelatihan yang diberikan.

Sesudah dilakukan pembinaan dan pelatihan maka juga dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan anak jalanan yang telah diberikan pembinaan dan pelatihan. Kegiatan pemantauan ini sebagai tindakan dinas sosial kabupaten Mojokerto untuk melihat apakah anak telah berhenti menjadi anak jalanan, telah bersekolah lagi dan melakukan wirausaha yang lebih layak untuk mereka. Melalui aksi ini, anak jalanan akan sadar bahwa tidak hanya dirinya yang menginginkan dan memperjuangkan sendiri masa depan yang cerah dengan mencari nafkah yang lebih layak. Pemantauan dilakukan oleh pekerja sosial perlindungan anak yang memantau anak dengan berbagai permasalahannya, salah satunya permasalahan anak jalanan. Pekerja sosial langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan dengan mendatangi rumah anak yang bersangkutan sesuai prosedur melakukan izin ke kecamatan, ke desa dan

langsung monitoring ke keluarga yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar bisa mengontrol anak untuk tidak kembali ke jalanan dan memberi kesadaran kepada keluarga untuk mendukung hal positif yang dilakukan oleh anak sehingga mereka dapat hidup normal layaknya anak pada umumnya. Jika pembinaan dan pelatihan yang telah dilakukan dinas sosial gagal atau anak tetap kembali lagi ke jalanan maka akan segera dilaporkan oleh tim pemantau untuk tindakan lebih lanjut oleh dinas sosial kab. Mojokerto.

PENUTUP

Simpulan

Strategi pengentasan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan melakukan sosialisasi, razia, pembinaan dan pengiriman anak ke UPT Jawa Timur, dalam pelaksanaan strategi tersebut *problem possing education* masih belum menjadi dasar dalam pengentasan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto, sehingga banyak anak jalanan yang kembali lagi ke jalanan karena dalam penanganannya belum dapat menumbuhkan kesadaran kritis anak jalanan untuk sadar dan meninggalkan jalanan meskipun telah diberikan penanganan sesuai prosedur oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Hambatan yang dialami dalam proses pengentasan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat yang masih memberikan uang kepada anak jalanan saat mengemis dan mengamen di jalanan, kurangnya antusiasme dari anak jalanan yang tercermin dari penolakan saat dirazia dan melakukan pembinaan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Hambatan terakhir muncul dari kurangnya dukungan dari keluarga anak jalanan yang tidak sebagian tidak memperbolehkan anaknya untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan dengan alasan akan merugikan dan menganggu aktivitas sekolah anak yang masih duduk dibangku sekolah.

Kegagalan pengentasan anak jalanan disebabkan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tidak menumbuhkan kesadaran kritis anak jalanan sehingga menyebabkan kurang optimalnya program yang dilakukan untuk mengentaskan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto.

Saran

Masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto agar mereka tidak lagi memberikan uang kepada anak jalanan yang mengemis atau mengamen di jalan raya. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto hendaknya melakukan setiap penanganan dengan mendasarkan pada menumbuhkan kesadaran kritis

anak jalanan agar mereka dapat sadar dan mengentaskan dirinya dari jalanan, karena dalam penanganan yang dilakukan masih mendasarkan pada *banking education* yang menganggap anak jalanan sebagai obyek yang hanya diberikan pendidikan, pembinaan dan pelatihan tanpa bertujuan menumbuhkan kesadaran kritisnya. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebaiknya melakukan pendekatan penanganan berdasarkan kategori anak jalanan *children on the street*, *children of the street*, dan *children from families of the street* sehingga dari ketiga kategori anak jalanan tersebut terdapat perbedaan penanganan yang dilakukan karena mereka memiliki masalah yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John. 2009. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Effendi, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Hidayat, Rakhmat. 2013. *Pedagogi Kritis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miles, B Matthew dan Huberman A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nuryatno, Agus. 2008. *Mazhab Pendidikan Kritis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Oliver, Sandra. 2007. *Strategi Public Relations*. Jakarta: Erlangga.
- Smith, A William. 2008. *Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto Edi, Ph.D. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suyanto, Bagong dan Hariadi, Sri Sanituti. 1999. *Anak Jalanan di Jawa Timur*. Surabaya: Airlangga University Press.

<http://mojokertokab.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/54>
(diakses pada tanggal 21-12-2015 pukul 22.15 WIB)

<http://jatim.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 22-12-2015 pukul 22.30 WIB)

UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Sumber Lain

Dinas Sosial Kab. Mojokerto